

Kehidupan buruh perkebunan kopi di Dampit tahun 1870-1930

Muhammad Bahtiar Syarifudin^{1*}, Ari Sapto², Reza Hudiyanto³

¹Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, bahtiarisyarifudin212@gmail.com

²Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, ari.sapto.fis@um.ac.id

³Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, r.reza.fis@um.ac.id

*¹Corresponding email: bahtiarisyarifudin212@gmail.com

Abstract

The end of the cultuurstelseel policy and the emergence of the Agrarian Law of 1870 led to the development of plantations on a large scale, because this system gave private parties the right to develop their business in the field of export commodities by leasing native land. This has caused many people to migrate from villages to plantation areas to work as plantation labourers. This study attempts to describe the development of plantations which have begun to expand into inland areas on the island of Java, especially in Malang. Besides that, how is the life of plantation workers as plantation workers, where plantation workers occupy the lowest strata in stratification. This paper is reviewed using the historical method with sources that have been collected in the form of photo archives and documents, as well as several written sources in the form of books and articles. The policies implemented by the Dutch East Indies government greatly influenced the life of the indigenous people, especially from a social and economic point of view of the community itself.

Keywords

labour; plantation; life.

Abstrak

Berakhirnya kebijakan *cultuurstelsel* dan munculnya UU Agraria tahun 1870 menyebabkan perkembangan perkebunan secara besar besaran, karena sistem tersebut memberikan hak kepada pihak swasta untuk mengembangkan bisnisnya dibidang komoditas ekspor dengan cara menyewa tanah bumiputera. Hal itu menyebabkan banyaknya migrasi masyarakat dari desa menuju ke kawasan perkebunan untuk bekerja sebagai buruh perkebunan. Kajian ini berusaha menggambarkan perkembangan perkebunan yang mulai meluas ke area pedalaman di pulau Jawa terutama di Malang. Selain itu bagaimana kehidupan buruh perkebunan sebagai tenaga kerja yang menempati strata paling bawah dalam stratifikasi. Tulisan ini dikaji menggunakan metode sejarah dengan sumber yang sudah dikumpulkan berupa arsip foto maupun dokumen, serta beberapa sumber tertulis berupa buku dan artikel. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat bumiputera, terutama dari segi sosial maupun ekonomi masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci

buruh; perkebunan; kehidupan.

***Received:** December 7th, 2022
***Revised:** March 31st, 2023

***Accepted:** April 29th, 2023
***Published:** April 30th, 2023

PENDAHULUAN

Pada perekonomian masa kolonialisme Indonesia sangat terkait dengan sistem pajak yang diterapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. Oleh karena itu, tidak salah jika para sejarawan membagi beberapa periode perekonomian Indonesia masa kolonialisme Belanda. Untuk yang pertama merupakan perekonomian masa Vereenigde Oostindische Compagnie atau biasa disebut VOC (1600-1800) merupakan organisasi perdagangan pertama dari Belanda yang mencari rempah-rempah di Nusantara untuk diperdagangkan. Kemudian masa awal mula beralihnya kekuasaan VOC kepada pemerintah Hindia-Belanda (1800-1830), yang kemudian dilanjutkan oleh perekonomian cultuurstelsel (1830-1870) yang diterapkan oleh gubernur Van den Bosch, zaman liberal (1870-1900) dimana berakhirnya sistem cultuurstelsel yang mendapat kritik dari dunia Eropa karena dianggap sebagai sistem yang tidak manusiawi. Selain itu ada masa ini juga merupakan berkembangnya sistem kapitalisme Eropa, Zaman Etika (1900-1930), dan Zaman Malaise (1930-1940) (Booth et al., 1988).

Temporal yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu pada masa liberal 1870-1900 hingga zaman etika 1900-1930. Pada masa cultuurstelsel, Pemerintah Hindia-Belanda melakukan pembukaan lahan besar-besaran untuk memproduksi komoditas ekspornya. Pembukaan lahan perkebunan ini khususnya terjadi di Jawa dan juga Sumatera. Kedua pulau tersebut dianggap sebagai pemilik tanah yang cukup subur dan menjanjikan jika digunakan sebagai lahan perkebunan. Pada masa cultuurstelsel, selain kebijakan dalam pembukaan lahan perkebunan, pemerintah Hindia-Belanda juga menerapkan kebijakan komoditas yang wajib untuk ditanam. Kemudian berkembang lagi pada masa liberal setelah munculnya UU Agraria, pembebasan kepada pihak swasta untuk menyewa tanah masyarakat bumiputera (Yuliati, 2012). Di Jawa sendiri, sistem lama yang dikenal masyarakat merupakan sistem feodal, kemudian dirubah oleh pihak kolonial. Para elite bumiputera digunakan sebagai penggerak masyarakat sebagai tenaga kerja untuk mengelola sawah ataupun perkebunan (Breman, 2014).

Pembukaan lahan perkebunan terjadi hampir diseluruh pulau Jawa. Ekspansi perkebunan ini juga sampai di daerah pedalaman yang sebelumnya kurang begitu di eksploitasi. Mulai adanya ekspansi dalam pembukaan lahan baru di Malang sekitar pada tahun 1837. Malang sudah menghasilkan sekitar 57.000 pikul kopi pada saat itu. Karena potensi dalam produksi kopi tersebut, pemerintah Hindia-Belanda melakukan ekspansi ke wilayah pedalaman Malang. Kemudian pada tahun 1846 di Malang mengalami peningkatan dalam produksi kopi dan juga bertambahnya jumlah penduduk sebanyak 80.000 jiwa (Hudiyanto, 2015). Akhirnya pada tahun tersebut di bawah inspektur kehutanan atau disebut sebagai Inspecteur van het Boswezen, pembukaan lahan di wilayah pedalaman mulai dilakukan (Anrooij, 2014).

Wilayah-wilayah penghasil kopi yang cukup banyak di Malang merupakan wilayah Malang bagian utara seperti Dinoyo, Lawang, dan Pakis. Selain daerah tersebut, Batu juga tercatat sebagai penghasil kopi yang cukup banyak. Peningkatan produksi perkebunan dan perluasan perkebunan tersebut memengaruhi bertambahnya jumlah penduduk di Malang. Adanya migrasi orang Madura ke Malang yang sebagian besar menjadi buruh lepas dan juga adanya migrasi etnis Tionghoa dari luar Malang yang sebagian besar menjadi pedagang. Selain itu, pada tahun 1847 tercatat bertambahnya Orang Eropa sejumlah 103 jiwa, yang sebelumnya pada tahun 1830 diperkirakan kurang dari 50 jiwa (Hudiyanto, 2015).

Perkembangan perkebunan tersebut diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk di Malang, sudah disebutkan sebelumnya bahwa adanya migrasi penduduk dari luar Malang. Bertambahnya jumlah penduduk ini berdampak terhadap perekonomian maupun perkembangan kota Malang sendiri. Semakin banyak penduduk maka kebutuhan yang harus dipenuhi juga semakin banyak. Hal ini menimbulkan perkembangan perekonomian dalam bidang produksi, perdagangan, dan juga konsumsi masyarakat, karena sebagian besar pertumbuhan jumlah penduduk tersebut didominasi oleh para bumiputera sebagai buruh perkebunan maupun industri yang muncul pada akhir abad 19. Kondisi kehidupan ekonomi buruh perkebunan ini yang nantinya akan menjadi kajian pembahasan (Wirakartakusumah, 1999). Dalam teori ekonomi, buruh perkebunan merupakan sebagai tenaga kerja dalam bidang perkebunan, yang nantinya akan menghasilkan komoditas ekspor bagi pihak pemilik perkebunan (Rosyidi, 2012).

Penulisan ini diambil berdasarkan inspirasi dari tulisan Hudiyanto (2015). Tulisan tersebut berisikan mengenai perkebunan kopi dan gula di wilayah Malang. Selain itu dalam tulisan tersebut juga memuat mengenai migrasi orang-orang dari luar Malang ke Malang. Dari sinilah penulis terinspirasi untuk mengkaji kehidupan buruh perkebunan di wilayah Malang Selatan. Karena dalam tulisan tersebut lebih terfokus pada pembahasan perkembangan dan hasil perkebunan wilayah Malang Utara. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha untuk menggambarkan kehidupan buruh perkebunan kopi di wilayah Malang Selatan sejak masa cultuurstelsel di Dampit pada tahun 1870-1930.

Referensi berikutnya diambil dari tulisan Yuliati (2012). Berdasarkan tulisan tersebut dijelaskan sistem pemerintahan di Malang pada masa kolonialisme Belanda. Referensi tersebut cukup membantu dalam penulisan ini dikarenakan mengandung informasi mengenai pemerintahan yang ada pada masa kolonial. Selain itu, juga berisi mengenai perkembangan kota Malang pada tahun 1900-an, dan juga pertumbuhan penduduk termasuk pembagian wilayah tempat tinggal untuk Orang Eropa, Timur Asing, dan juga Bumiputera. Selain tulisan ini dalam menunjang informasi mengenai kota Malang, penulis juga menggunakan Baskara (2010). Artikel dalam majalah tersebut berisikan Kota Malang masa kolonial, dan berisi perkembangan Kota Malang yang menjadi tempat wisata dan peristirahatan pada masa kolonial. Hal ini sangat

membantu dalam penulisan ini, karena setidaknya bertambahnya jumlah penduduk di Malang dipengaruhi berbagai hal, salah satunya wisata dan tempat peristirahatan yang dibahas dalam artikel tersebut.

Referensi berikutnya berasal dari Anrooij (2014). Dalam tulisan Anrooij ini berisi mengenai daftar dari organisasi pemerintahan pada masa kolonial. Dari sini dapat diketahui organisasi yang bertugas menangani perkebunan, dan juga tugas mereka. Selain itu, dalam penulisan ini juga setidaknya membahas perekonomian. Oleh karena itu, dalam menunjang tulisan ini penulis menggunakan sumber Booth et al (1988) dan juga Wirakartakusumah (1999).

Untuk referensi berikutnya dalam mengkaji perkebunan dan juga sistem yang berlaku pada masa itu penulis menggunakan tulisan dari Breman (2014). Dalam buku tersebut membahas mengenai perkebunan dari masa VOC hingga peralihan kekuasaan Hindia-Belanda. Akan tetapi, fokusnya di Kabupaten Priangan saja. Walaupun seperti itu, setidaknya ada beberapa hal umum yang dibahas seperti kebijakan tanam paksa maupun perluasan perkebunan yang terjadi. Sumber ini juga membahas mengenai keuntungan kolonial dari kerja paksa, eksploitasi hasil bumi di Indonesia, dan bagaimana pihak kolonial mendapatkan keuntungan dari kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kajian yang dikaji dalam penulisan ini yaitu mengenai kehidupan dari buruh perkebunan. Dimana perkembangan perkebunan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk, dan sebagian besar penduduk tersebut merupakan tenaga kerja buruh perkebunan. Dari peristiwa penerapan kebijakan baru oleh pemerintah Hindia-Belanda digambarkan bagaimana dampak dalam perkembangan perkebunan dan kehidupan buruh perkebunan. Dampak lain yang berkelanjutan dari peristiwa tersebut juga adanya peningkatan ekonomi, dari ekonomi masyarakat maupun ekonomi pemerintah.

Pemilihan topik dari penelitian ini sendiri yaitu kehidupan sosial-ekonomi buruh perkebunan. Alasan mengapa topik ini yang diambil karena masih minimnya penelitian yang memuat topik mengenai kehidupan buruh perkebunan. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan kehidupan buruh perkebunan. Pada kurun waktu 1870-1930 di wilayah Malang populasi terbanyak merupakan kaum bumiputera yang sebagian besar bekerja sebagai buruh perkebunan. Selain dari kaum bumiputera ada juga pekerja perkebunan dari Etnis Tionghoa.

Kajian ini diajukan karena minimnya sejarah yang membahas mengenai kehidupan sosial-ekonomi buruh perkebunan khususnya di Malang. Mengambil ruang lingkup wilayah Malang selatan tepatnya di Dampit, karena merupakan salah satu wilayah yang mengalami pembukaan lahan perkebunan secara besar-besaran setelah adanya UU Agraria pada tahun 1870.

Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menggambarkan perkembangan perkebunan kopi dan kehidupan buruh perkebunan kopi di Dampit pada masa kolonial. Karena secara umum buruh perkebunan memiliki tempat tinggal sendiri yang

disediakan oleh pihak pemilik perkebunan. Bahkan ada pula rumah sakit yang dikhususkan untuk pengobatan buruh perkebunan, yang didirikan oleh perusahaan perkebunan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana perkembangan perkebunan di Dampit, apakah perkembangan perkebunan tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat bumiputera yang sebagian besar bergantung hidup sebagai buruh perkebunan. Itulah tujuan yang ingin dipaparkan dalam penelitian ini. Karena perkembangan perkebunan tersebut memiliki dampak terhadap jumlah perekrutan buruh perkebunan sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian merupakan metode sejarah. Pada tahap pertama yang dilakukan yaitu heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber yang didapat dalam heuristik ini yaitu berupa buku dari Jan Breman (2014), Francien van Anrooij (2014), dan beberapa sumber penunjang lainnya. Dalam dua buku yang disebutkan sebelumnya, memuat tentang sistem kebijakan yang diterapkan pemerintah Hindia-Belanda di nusantara. Selain itu, ada juga artikel dari Reza Hudyanto (2015) dan Yulianti (2012) dalam artikel tersebut menggambarkan kondisi perkembangan perkebunan di Malang, sistem pemerintahan yang diterapkan, dan juga pertumbuhan penduduknya. Setelah mendapatkan sumber-sumber tersebut, tahap kedua yang dilakukan yaitu kritik sumber. Dalam tahap ini kritik sumber yang penulis lakukan berupa membandingkan beberapa sumber dari buku maupun jurnal dimana setidaknya memuat informasi yang membantu dalam penelitian ini. Selain itu, mencari peta dan juga foto-foto yang sekiranya sezaman dengan judul penelitian yang penulis ajukan. Tahap ketiga yaitu interpretasi, yang mengharuskan kita menafsirkan sumber-sumber yang kita dapat tersebut. Karena interpretasi ini bersifat subjektif, maka dari itu para sejarawan diharapkan membandingkan sumber dalam tahap kritik untuk mendapat hasil yang setidaknya mendekati obyektif. Untuk tahapan ini sekaligus dilakukan dengan tahapan terakhir yaitu historiografi. Dari sumber-sumber yang telah melewati kritik sumber, dapat diinterpretasikan berdasarkan apa yang akan dibahas dalam kajian ini. Tahap terakhir dari metode ini yaitu historiografi atau penulisan sejarah (Kuntowijoyo, 2003). Dari awal tahap yang dilakukan maka sampailah dalam penulisan sejarah berdasarkan interpretasi sumber-sumber yang telah didapatkan. Berdasarkan data yang diperoleh dan juga interpretasi barulah tahap terakhir ini bisa dilakukan. Historiografi dalam penelitian ini mengambil judul “kehidupan buruh perkebunan kopi rakyat di Dampit pada tahun 1870-1930”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Perkebunan Kopi di Dampit

Pembukaan lahan perkebunan terjadi hampir di seluruh pulau Jawa. Bahkan daerah pedalaman yang sebelumnya kurang diminati sebagai wilayah perkebunan, mulai ada perkembangan dalam pembukaan lahan baru. Seperti di Malang sendiri

sekitar pada tahun 1837, Malang sudah menghasilkan sekitar 57.000 pikul kopi. Pada masa itu wilayah Malang memiliki penduduk sebanyak 40.000 jiwa. Karena potensi dalam menghasilkan produk kopi tersebut, akhirnya pada tahun 1830-an tersebut banyak Bangsa Eropa yang tertarik dan pindah ke Malang. Pemerintah Hindia-Belanda juga melirik karena hasil produksi kopi tersebut. Kemudian pada tahun 1846 di Malang mengalami peningkatan dalam produksi kopi dan juga bertambahnya jumlah penduduk sebanyak 80.000 jiwa (Hudiyanto, 2015). Akhirnya pada tahun itu juga di bawah inspektur kehutanan atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Inspecteur van het Boswezen*. Pembukaan lahan dilakukan (Anrooij, 2014).

Wilayah-wilayah penghasil kopi yang cukup banyak di Malang merupakan wilayah Malang bagian utara seperti Dinoyo, Lawang, dan Pakis. Selain daerah tersebut, Batu juga tercatat sebagai penghasil kopi yang cukup banyak. Peningkatan produksi perkebunan dan perluasan perkebunan tersebut juga mempengaruhi bertambahnya jumlah penduduk di Malang. Adanya migrasi orang Madura ke Malang yang sebagian besar menjadi buruh lepas dan juga adanya migrasi etnis Tionghoa dari luar Malang yang sebagian besar menjadi pedagang. Selain itu, pada tahun 1847 juga tercatat bertambahnya Orang Eropa sejumlah 103 jiwa dimana sebelumnya pada tahun 1830 diperkirakan kurang dari 50 jiwa (Hudiyanto, 2015).

Perluasan perkebunan di Malang meningkat kembali ketika dikeluarkannya UU Agraria pada tahun 1870. Undang-undang yang memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk menyewa tanah tersebut menyebabkan bertambahnya pihak swasta yang datang ke Malang dan mulai membuka lahan perkebunan baru sebagai investasinya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya wilayah Malang bagian utara yang mendominasi sebagai wilayah perkebunan, sejak pembukaan lahan baru oleh pihak swasta banyak pembukaan lahan perkebunan di wilayah Malang bagian selatan. Walaupun sebelumnya juga sudah ada perkebunan, tetapi meningkat drastis ketika adanya investasi dari pihak swasta untuk membuka lahan perkebunan baru tersebut. Seperti di distrik Turen dan Dampit, banyak perkebunan kopi dan tebu yang dibuka di wilayah tersebut. (Baskara, 2010).

Tidak hanya dikedua distrik tersebut, selain dari Turen dan Dampit, perluasan jauh mengarah ke timur seperti wilayah Ampelgading. Bahkan pada tahun 1900, sudah didirikan kantor administratif untuk tempat penyetoran kopi dari kebun-kebun wilayah Ampelgading. Menandakan pada tahun tersebut sudah ada pusat administratif di wilayah Malang Selatan, walaupun tidak seramai di Dampit. Karena pada tahun tersebut Dampit sudah memiliki jalur trem sebagai transportasi manusia maupun transportasi hasil perkebunan.

Beberapa perusahaan perkebunan menggunakan mata uang atau *plantage tokens* yang dicetak sesuai dengan perusahaan perkebunan yang mengeluarkannya, sebagai upah para pekerja (Lansen, 2005). Seperti halnya salah satu perkebunan kopi di Dampit yaitu Boemie Ajoe yang mengeluarkan pecahan uang receh untuk pembayaran atau upah buruh perkebunan. Selain dari upah yang didapatkan tenaga

kerja perkebunan, fasilitas kesehatan dan juga kamp buruh perkebunan didirikan di area perkebunan (lihat foto 1).



Foto 1. lawe 58 boemie ajoe 25 cents kz

Sumber: Lansen, 2005

Selain dari perkebunan kopi, ada berbagai perkebunan lain yang juga dikembangkan oleh pihak kolonial seperti perkebunan karet. Lihat foto 2, berlokasi di perkebunan Kali Bakar, Dampit pada tahun 1920. Merupakan perkebunan karet dan lamtoro. Menandakan berkembangnya perkebunan pada tahun tersebut tidak hanya perkebunan kopi, tebu, dan teh saja di wilayah Malang Selatan.



Foto 2: Kawisarihybriden met rubberbomen en lamtara op landbouwonderneming Kali Bakar bij Dampit ten zuidoosten van 1920

Sumber: KITLV, 1920

Sistem tanam paksa di Jawa, dan juga penguasaan tanah pada masa kolonial mengharuskan mereka memutar otak untuk memenuhi tenaga kerja yang dibutuhkan agar target dalam produksi tercapai. Oleh karena itu, pihak kolonial Pemerintah Hindia-Belanda memonopoli mengenai tenaga kerja dari bumiputera maupun timur asing seperti pekerja cina untuk menjadi buruh perkebunan kolonial. Tanam paksa sendiri sebenarnya dikhususkan untuk masyarakat bumiputera yang memiliki tanah, dan diwajibkan menanam tanaman yang sudah ditentukan. Selain itu, bagi yang tidak memiliki tanah diwajibkan untuk bekerja sebagai bentuk pembayaran pajak pada

negara. Baru setelah adanya *De Koelie-Wetgeving Voor De Buitengewesten Van Nederlandsch Indië* yang mengatur tentang perburuhan sejak tahun 1880 (Heijting, 1925). Mulai dari sana masuk berbagai koeli dari bermacam-macam etnis, seperti Cina dan Melayu. Lihat lampiran foto 5, sekelompok buruh Cina di Borneo pada tahun 1890. Menandakan bahwa buruh pada masa itu tidak hanya bumiputera melainkan juga ada dari Etnis Cina.

Dengan politik yang diterapkan pihak kolonial, Pemerintah Hindia-Belanda berhasil memonopoli dalam eksploitasi sumber daya alam maupun manusia, seperti di daerah Kabupaten Priangan yang pada abad 19 merupakan daerah penghasil komoditas terbaik di Jawa. Keuntungan kolonial dari sistem tanam paksa yang telah diterapkan tidak dapat dipungkiri. Dengan tenaga kerja yang murah dan hasil yang melimpah, keuntungan dari sistem tanam paksa tersebut berkali-kali lipat. Akan tetapi, hal tersebut berdampak pada kesejahteraan buruh itu sendiri. Lihat lampiran foto 6, berisikan 3 orang buruh dari Batavia pada tahun 1867. Dari pakaian dan tampilan pada foto memang menunjukkan bahwa foto tersebut sezaman. Selain itu, kita dapat melihat perbedaan yang jelas berdasarkan pakaian antara bangsa Eropa dan buruh perkebunan bumiputera.

Setelah *cultuurstelsel* dihentikan, terjadi perubahan besar dari peraturan perburuhan hingga berkembangnya teknologi produksi kopi. Seperti pada lampiran foto 9, berisikan foto sebuah pabrik pengeringan kopi dengan mesin mekanik pada tahun 1920. Dapat disimpulkan pada tahun tersebut industri perkebunan sudah mulai menggunakan teknologi yang cukup maju.

Perluasan perkebunan di Malang meningkat kembali ketika dikeluarkannya UU Agraria pada tahun 1870. Undang-undang yang memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk menyewa tanah tersebut menyebabkan bertambahnya pihak swasta yang datang ke Malang dan mulai membuka lahan perkebunan baru sebagai investasinya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya wilayah Malang bagian utara yang mendominasi sebagai wilayah perkebunan, sejak pembukaan lahan baru oleh pihak swasta banyak pembukaan lahan perkebunan di wilayah Malang bagian selatan. Walaupun sebelumnya juga sudah ada perkebunan, tetapi meningkat drastis ketika adanya investasi dari pihak swasta untuk membuka lahan perkebunan baru tersebut. Seperti di distrik Turen dan Dampit, banyak perkebunan kopi dan tebu yang dibuka di wilayah tersebut (Baskara, 2010).

Perubahan sistem tanam paksa menjadi sistem sewa tanah kepada pihak swasta tersebut juga diikuti dengan perubahan sistem perburuhan, dimana sejak 1870-an tersebut di Deli peraturan mengenai koelie atau buruh mengalami perubahan. Sebelumnya para koelie bekerja dengan sistem sewa perorangan kemudian berubah menjadi kelompok. Pembayaran upah dengan uang tunai juga mulai menyebar ke penjuru Nusantara. Walaupun sebelumnya memang sudah dikenal alat tukar berupa uang, akan tetapi baru berkembang dan dirasakan semua masyarakat sampai dengan masyarakat kelas bawah seperti buruh perkebunan maupun industri pada tahun-tahun

1870-an tersebut. Begitu juga di Malang, dimana beberapa perusahaan perkebunan juga menggunakan mata uang yang dicetak sesuai dengan perusahaan perkebunan yang mengeluarkannya, sebagai upah para pekerja (Lansen, 2005).

Kehidupan Buruh Perkebunan Pada 1870-1930

Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan pokok untuk memenuhi kehidupannya maupun keluarganya. Manusia yang sadar akan kebutuhan pokoknya yang harus dipenuhi, akan berusaha untuk mencari cara dalam memenuhi hal tersebut. Seperti halnya buruh perkebunan kopi. Dimana mereka menggantungkan hidup dari hasil bekerja di perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Gunawijaya, 2017).

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, setiap manusia memiliki kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu, kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi untuk bertahan hidup pertama yaitu pangan, kemudian sandang, dan papan. Di masa kolonialisme, dimana banyak bumiputera yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh perkebunan. Hal itu dikarenakan pada tahun 1870 an, perkembangan perkebunan kolonial mulai berkembang semenjak datangnya masa liberal. Dimana perusahaan swasta diperbolehkan untuk membuka lahan perkebunan atas izin pemerintah Hindia-Belanda (Afgani & Husain, 2018).

Karena perkembangan lahan perkebunan yang makin banyak, terutama di Malang Bagian selatan. Banyak buruh migran yang datang ke wilayah tersebut untuk mencari pekerjaan. Buruh tersebut datang dari wilayah Madura, Solo dan sekitarnya. Hal ini menyebabkan pertambahan jumlah penduduk di wilayah Malang. Seiring berjalannya waktu dengan bertambahnya populasi, maka kebutuhan masyarakat juga semakin banyak. Menimbulkan berkembangnya pusat ekonomi masyarakat Bumiputera di masa itu.

Dampit merupakan salah satu tempat yang ramai untuk bertransaksi dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama kebutuhan pangan. Karena di Dampit juga merupakan jalur transportasi produk perkebunan kopi dari daerah sekitar seperti Ampelgading. Dimana produk tersebut akan disetorkan ke pusat kota Malang kemudian menuju ke Surabaya untuk di ekspor.

Berdasarkan peraturan koelie yang dikeluarkan dalam De Koelie-Wetgeving Voor De Buitengewesten Van Nederlandsch Indië, terjadi perubahan besar mengenai sistem tenaga kerja perkebunan. Dimana persebaran para buruh mulai merata di tempat-tempat yang dibutuhkan (Heijting, 1925). Selain itu, gaji atau pendapatan para buruh juga diatur dalam peraturan tersebut. Kemudian adanya sistem borongan dimana buruh dipekerjakan berkelompok dan bekerja sesuai surat perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Karena gaji buruh yang sudah ditetapkan, maka pendapatan buruh perkebunan juga bisa dipastikan. Hal tersebut berdampak pada perekonomian masyarakat. Dimana

jika sebelumnya masyarakat masih menggunakan sistem barter sebagai transaksi. Sejak dikenalnya sistem mata uang, transaksi pun berubah. Ramainya pasar-pasar sebagai tempat jual beli bagi masyarakat. Seperti yang ada di lampiran foto 8. Berisikan aktivitas ekonomi tradisional yang menggambarkan keadaan pada tahun tersebut. Foto 8 ini diambil sekitar tahun 1900. Menandakan berjalannya ekonomi masyarakat pada masa itu (Yuliati, 2018).

Perubahan sistem tanam paksa menjadi sistem sewa tanah kepada pihak swasta, diikuti dengan perubahan sistem perburuhan, dimana sejak 1870-an di Deli peraturan mengenai koelie atau buruh mengalami perubahan. Sebelumnya para koelie bekerja dengan sistem sewa perorangan kemudian berubah menjadi kelompok. Pembayaran upah dengan uang tunai juga mulai menyebar ke penjuru Nusantara. Walaupun sebelumnya memang sudah dikenal alat tukar berupa uang, akan tetapi baru berkembang dan dirasakan semua masyarakat sampai dengan masyarakat kelas bawah seperti buruh perkebunan maupun industri pada tahun-tahun 1870 tersebut.

Pada masa kolonial, di Nusantara merupakan sebagai tahap awal pemanfaatan tenaga kerja kapitalisme Bangsa Eropa. Para bumiputera yang bekerja sebagai buruh perkebunan maupun industri sudah terdoktrin untuk tidak melawan kepada para pemilik perusahaan entah itu perkebunan maupun industri pabrik. Oleh karena itu, walaupun pada kenyataannya upah buruh tidak seberapa akan tetapi mereka tetap menerima dan sudah menjadi kebiasaan untuk ketergantungan bekerja sebagai buruh demi kehidupan sehari-hari. Sedangkan perusahaan yang mempekerjakan mereka bisa mendapatkan keuntungan berkali lipat dari hasil yang diperoleh, karena mayoritas produk pada masa kolonial dijual belikan di pasar Eropa. Inilah yang menjadikan kemiskinan bagi kaum buruh pada masa itu, belum adanya kesadaran untuk menuntut hak atas kerja keras mereka (Purwandari, 2011).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kolonialisme Hindia-Belanda telah mempengaruhi perekonomian masyarakat bumiputera pada masa itu. Dimana kebijakan yang diterapkan berubah seiring bergantinya gubernur jenderal Hindia Belanda. Dari masa tanam paksa hingga masa liberal banyak lahan yang disewakan kepada investor asing. Hal tersebut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat bumiputera dalam segi sosial maupun ekonomi, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya menjadi pekerja perkebunan. Berakhirnya kebijakan *cultuurstelsel* membawa perubahan yang besar dalam sektor perkebunan. Dimana semakin banyak investor asing yang membuka lahan di area pedalaman Jawa terutama di Malang untuk ditanami komoditas ekspor. Masyarakat yang menjadi buruh perkebunan mendapatkan upah dari hasil petik kopi berdasarkan berapa banyak yang mereka dapatkan. Dimana pada saat itu tiap perusahaan perkebunan mengeluarkan *plantage tokens* sebagai pembayaran. Selain itu perusahaan perkebunan biasanya menyediakan fasilitas seperti tempat tinggal yang dibangun seadanya dan juga fasilitas

kesehatan. Berdasarkan tulisan diatas dapat kita ketahui bahwa perubahan kebijakan yang diterapkan pada masa kolonialisme sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada masa itu. Kebijakan yang diterapkan hanya serta merta demi keuntungan pihak kolonial untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Afgani, R., & Husain, S. B. (2018). Manisnya Kopi di Era Liberal: Perkebunan Kopi Afdeling Malang, 1870-1930. *IHiS (Indonesian Historical Studies)*, 2(1), 24–35.
- Anrooij, F. van. (2014). *De Koloniale Staat (Negara Kolonial) 1854-1942* (N. W. Santoso & S. Moeimam (trans.)). *Nationaal Archief*.
- Baskara, M. (2010). Kota Malang - Kota Taman Specifiek Indonesische. *Majalah Ilmiah Populer Bakosurtanal. Ekspedisi Geografi Indonesia 2010 Jawa Timur*.
- Booth, A., Malley, W. J. O., & Weidemann, A. (1988). *Sejarah Ekonomi Indonesia*. LP3ES.
- Breman, J. (2014). Keuntungan Kolonial Dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1920-1870. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1), 131–150.
- Heijting, H. G. (1925). *De koelie-wetgeving voor de buitengewesten van Nederlandsch-Indië*. N. V. Boekhandel v/b W. P. van Stockum & Zoon. <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/1026603#page/1/mode/1up>
- Hudiyanto, R. R. (2015). Kopi dan Gula: Perkebunan di Kawasan Regentschap Malang 1832-1942. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 9(1), 96–115. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/1565/853>
- KITLV. (1920). *Kawisarihybriden met rubberbomen en lamtara op landbouwonderneming Kali Bakar bij Dampit ten zuidoosten van Malang*. <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/787806>
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Lansen, A. J. (2005). *Plantagegeld van Nederlands Indië. Europees Genootschap Voor Munt-En Penningkunde*. https://www.egmp-vzw.be/Pdf/jaarboeken/2000-2010/JEGMP_2005_6.pdf
- Purwandari, H. (2011). Sistem Ekonomi Perkebunan: Persistensi Ketergantungan Negara Dunia Ketiga. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 10(1), 63–79.
- Rosyidi, S. (2012). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*. Rajawali Pers.
- Wirakartakusumah, M. D. (1999). *Bayang-bayang Ekonomi Klasik*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Yuliati, D. (2018). Nasionalisme Buruh Versus Kolonialisme: Suatu Kajian Tentang Gerakan Buruh di Semarang pada Awal Abad XX. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Dan Informasi*, 2(2), 213–224.

Yuliati, Y. (2012). Sistem Pemerintahan Wilayah Malang Pada Masa Kolonial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 25(1), 53–61.
<http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5506>